

LAPORAN SEMESTER I

BADAN KEUANGAN DAERAH



2025

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur dipanjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala berkat dan karuniaNya kepada seluruh jajaran Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan pada Semester I Tahun 2025 (Januari sampai dengan kondisi 30 Juni 2025) dengan baik.

Berkaitan dengan pelaksanaan program dan kegiatan tahun anggaran 2025 Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, perlu melakukan pengendalian dan evaluasi sebagai bentuk pemenuhan terhadap pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dan dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Laporan Kinerja Semester I Tahun Anggaran 2025 ini disampaikan sebagai bentuk pertanggungjawaban Badan Keuangan Daerah dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsinya dan kiranya dapat menjadi pijakan dalam melaksanakan berbagai aktivitas pada tahun - tahun mendatang.

Kupang, Juli 2025

KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

Drs. BENHARD MENO, MT
PEMBINA TINGKAT I (IV/B)
NIP. 19720512 199101 1 001

Daftar Isi

	halaman
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iii
Daftar Gambar	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Dasar Hukum.....	2
1.3. Maksud dan Tujuan.....	3
1.4. Organisasi dan Personalia.....	3
1.5. Sistematika Penyajian.....	6
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	7
2.1. Tugas dan Fungsi Badan Keuangan Daerah.....	7
2.2 Target Kinerja	7
BAB III PELAKSANAAN.....	10
3.1. Pelaksanaan Administrasi Umum dan Kepegawaian.....	10
3.2 Hasil Pelaksanaan Program dan Kegiatan.....	14
BAB IV PERMASALAHAN DAN SOLUSI	52
4.1 Permasalahan dan Solusi	52
BAB V PENUTUP.....	65

Daftar Tabel

Tabel		halaman
Tabel 2.1	Perjanjian Kinerja Badan Keuangan Daerah Tahun 2022.....	8
Tabel 3.1	Rekapitulasi Surat Masuk Badan Keuangan Daerah...	10
Tabel 3.2	Rekapitulasi Surat Keluar Badan Keuangan Daerah...	11
Tabel 3.3	Komposisi Pegawai berdasarkan Jabatan Struktural/Fungsional.....	12
Tabel 3.4	Komposisi Pegawai berdasarkan Jenis Kelamin dan Golongan.....	12
Tabel 3.5	Komposisi Pegawai berdasarkan Agama.....	13
Tabel 3.6	Komposisi Pegawai berdasarkan Pendidikan Umum....	13
Tabel 3.7	Komposisi Tenaga Kontrak.....	14
Tabel 3.8	Realisasi Pendapatan Badan Keuangan Per 30 Juni 2022.....	15
Tabel 3.9	Realisasi Anggaran Belanja.....	21
Tabel 3.10	Hasil Pelaksanaan Bidang Anggaran.....	34
Tabel 3.11	Hasil Pelaksanaan Bidang Pembinaan Keuangan Kabupaten/Kota.....	36
Tabel 3.12	Hasil Pelaksanaan Bidang Perbendaharaan.....	43
Tabel 3.13	Hasil Pelaksanaan Program Kegiatan Bidang Akuntansi dan Pelaporan.....	50

Daftar Gambar

Gambar	Halaman
Gambar 1.1 Struktur Organisasi Badan Keuangan Daerah.....	5

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT seperti yang termuat dalam Peraturan Daerah Provinsi NTT Nomor 2 Tahun 2021 memiliki tugas membantu Gubernur untuk melaksanakan fungsi penunjang keuangan daerah.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi, Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT selama semester I Tahun Anggaran 2025 telah melaksanakan berbagai kegiatan. Berbagai kegiatan tersebut dilaksanakan dengan maksud agar seluruh rencana program dan kegiatan dapat terealisasi, terarah dan tepat sasaran.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan pada semester I tahun 2025, maka disusunlah Laporan Kinerja Semester I. Melalui Laporan Kinerja Semester I diharapkan dapat menjadi informasi mengenai kinerja Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT sekaligus menjadi bahan masukan bagi peningkatan akuntabilitas kinerja pada masa yang akan datang. Peningkatan kinerja diperlukan agar Badan Keuangan Daerah dapat lebih meningkatkan tugas dan fungsinya dalam rangka berperan memberikan dukungan teknis dan administrasi di bidang keuangan daerah.

1.2 Dasar Hukum

Dasar hukum pelaksanaan berbagai program dan kegiatan pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;

- c. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Nomor Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810)
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah;
- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
- i. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110 Tahun 2023 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Petunjuk Teknis Bagian Dana Alokasi Umum yang Ditentukan Penggunaannya;
- j. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- k. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 Nomor 006).

1. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 81 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024).

1.3 Maksud dan Tujuan

Laporan Kinerja Semester I Badan Keuangan Daerah Tahun 2025 merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan.

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Semester I Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT Tahun 2025 adalah untuk menilai serta mengevaluasi pencapaian kinerja kegiatan dan sasaran Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT dengan dasar evaluasi yang dilakukan, selanjutnya dirumuskan beberapa rekomendasi yang dapat menjadi salah satu masukan dalam menetapkan kebijakan dan strategi yang akan datang guna peningkatan kinerja.

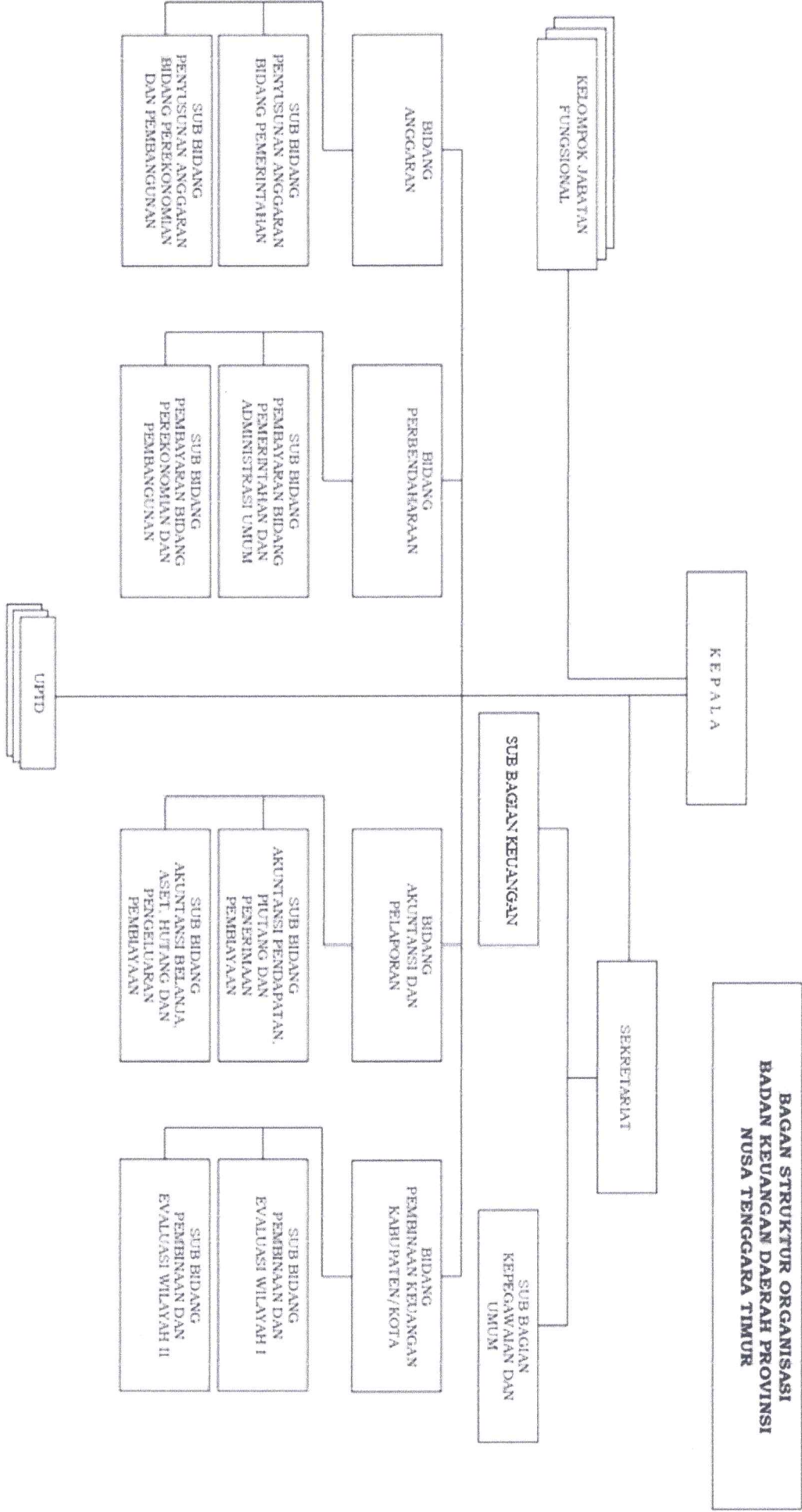
1.4 Organisasi dan Personalia

Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya, struktur Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT terdiri dari :

- a. Sekretariat, terdiri atas :
 - 1) Sub Keuangan.
 - 2) Sub Kepegawaian dan Umum.
- b. Bidang Anggaran, terdiri atas :
 - 1) Sub Bidang Penyusunan Anggaran Bidang Pemerintahan.
 - 2) Sub Bidang Penyusunan Anggaran Bidang Perekonomian dan Pembangunan.
- c. Bidang Perbendaharaan, terdiri atas :
 - 1) Sub Bidang Pembayaran Bidang Pemerintahan dan Administrasi Umum.
 - 2) Sub Bidang Pembayaran Bidang Perekonomian dan Pembangunan.
- d. Bidang Akuntansi dan Pelaporan, terdiri atas :

- 1) Sub Bidang Akuntansi Pendapatan, Piutang dan Penerimaan Pembiayaan.
 - 2) Sub Bidang Akuntansi Belanja, Aset, Hutang dan Pengeluaran Pembiayaan.
- e. Bidang Pembinaan Keuangan Kabupaten /Kota, terdiri atas :
- 1) Sub Bidang Pembinaan dan Evaluasi Wilayah I.
 - 2) Sub Bidang Pembinaan dan Evaluasi Wilayah II.
- f. Kelompok Jabatan Fungsional tertentu.

Gambar 1.1



1.5 Sistematika Penyajian

Pada dasarnya Laporan Semester ini secara umum menginformasikan capaian kinerja Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT semester I Tahun 2025. Membandingkan antara capaian kinerja dengan rencana kinerja sebagai tolak ukur keberhasilan dari hasil analisis terhadap celah kinerja tersebut, dapat diperoleh masukan bagi perbaikan kinerja di masa yang akan datang.

Dengan pola pikir dimaksud, sistematika penyajian Laporan Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT Semester I Tahun 2025 sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Dasar Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Organisasi dan Personalia
- 1.5 Sistematika Penyajian

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

- 2.1 Tugas dan Fungsi Badan Keuangan Daerah
- 2.2 Target Kinerja

BAB III PELAKSANAAN

- 3.1 Pelayanan Administrasi Umum dan Kepegawaian
- 3.2 Hasil Pelaksanaan Program dan Kegiatan

BAB IV PERMASALAHAN DAN SOLUSI

- 4.1 Permasalahan
- 4.2 Solusi

BAB V PENUTUP

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1 Tugas dan Fungsi Badan Keuangan Daerah

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 95 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Badan Keuangan Daerah mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang Keuangan yang menjadi kewenangan daerah. Dalam melaksanakan tugasnya, Badan Keuangan Daerah menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan kebijakan teknis di bidang keuangan daerah.
- b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang keuangan daerah.
- c. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang keuangan daerah.
- d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di bidang keuangan daerah.
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.2 Target Kinerja

Pada tahun 2025, Perjanjian Kinerja Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT adalah untuk mewujudkan manajemen target kinerja jangka menengah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil.

Adapun Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 BADAN KEUANGAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

A. Sasaran Strategis Perangkat Daerah yang tertuang dalam RENSTRA/IKU Perangkat Daerah

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		TARGET
1	2	3		5
1.	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah yang Efektif, Efisien, Transparan Dan Akuntabel	1. Persentase Penyampaian dan Penetapan Dokumen Keuangan Secara Tepat Waktu dan Sesuai Ketentuan Perundang - Undangan		100 %
		2. Persentase Renperda APBD Kabupaten/Kota Yang Difasilitasi Tepat Waktu		100 %

B. Pelaksanaan Anggaran

No	Uraian	Alokasi	Target
1.	APBD		
a.	Belanja (Program)	Rp. 787.073.147.705,-	Realisasi minimal 85%
	1. Penujangan Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp. 20.990.960.988,-	Realisasi minimal 90%
	2. Pengelola Keuangan Daerah	Rp. 766.082.186.717,-	Realisasi minimal 85%
b.	Pendapatan	Rp. 3.416.135.171.857,-	Realisasi minimal 90%
	Jumlah Belanja+Pendapatan (APBD)	Rp. 4.203.208.319.562 , -	Realisasi minimal 90%

2. APBN		
a. Program Dekonsentrasi	Rp.	-
1. Percepatan Pelaksanaan Pembangunan	Rp.	-
2. Bina Administrasi Kewilayahan	Rp.	-
b. Program Tugas Pembantuan	Rp.	-
Jumlah Dekonsentrasi + Tugas Pembantuan	Rp.	-

Sumber : *Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT*

BAB III
PELAKSANAAN

3.1 Pelayanan Administrasi Umum dan Kepegawaian

A. Pelayanan Administrasi dan Umum

1. Surat Masuk

Tabel 3.1
Rekapitulasi Surat Masuk Badan Keuangan Daerah Prov. NTT
Januari s.d. Juni 2025

Unit	Januari 2025	Februari 2025	Maret 2025	April 2025	Mei 2025	Juni 2025
Sekretariat	83	58	48	35	42	48
Bidang Anggaran	70	69	109	40	75	109
Bidang Akuntansi dan Pelaporan	59	53	53	53	40	53
Bidang Pembinaan Keuangan Kab/Kota	16	15	10	6	5	10
Bidang Perbendaharaan	98	109	63	54	65	63
Jumlah	326	304	283	188	227	283
Total	1611					

Sumber : Sekretariat Kepala Badan Keuangan Daerah Prov. NTT

2. Surat Keluar

Tabel 3.2
Rekapitulasi Surat Keluar Badan Keuangan Daerah Prov. NTT
Januari s.d. Juni 2025

Unit	Januari 2025	Februari 2025	Maret 2025	April 2025	Mei 2025	Juni 2025
Sekretariat	67	58	106	60	84	44
Bidang Anggaran	7	7	13	13	6	10
Bidang Akuntansi dan Pelaporan	17	17	16	13	20	22
Bidang Pembinaan Keuangan Kab/Kota	10	13	13	6	15	15
Bidang Perbendaharaan	59	31	46	36	45	43
Jumlah	160	126	329	128	170	134
Total	1047					

Sumber : Sekretariat Kepala Badan Keuangan Daerah Prov. NTT

Membuat perencanaan kebutuhan sarana kearsipan yang berada di sekretariat untuk kebutuhan pemberkasan arsip file kepegawaian dari masing-masing PNS yang ada. Pengolahan kearsipan/naskah dinas, Penggandaan arsip/naskah dinas, Pengelolaan kearsipan/surat-menyurat, Perawatan naskah dinas, Penyediaan barang peralatan kantor. Penyediaan barang perlengkapan kantor, Penyelenggaraan rapat dinas, Pengamanan kantor, Penyediaan air dan listrik, Penyediaan sarana komunikasi, serta Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana.

Pengelolaan data kepegawaian, Penyiapan mutasi dan pembuatan usulan kenaikan pangkat, cuti, gaji berkala dan pensiun. Penyiapan bahan

pembinaan dan pengembangan pegawai, Penyiapan bahan kesejahteraan pegawai, Pembuatan buku jaga kenaikan pangkat, gaji berkala dan pensiun, Pengusulan mutasi pegawai Badan, Penyiapan bahan kesejahteraan rekapan kehadiran pegawai Badan, Penyiapan bahan pembinaan dan pengembangan pegawai Badan serta Pelayanan tamu.

B. Kepegawaian

Keadaan pegawai pada Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur berjumlah 69 orang dengan perincian sebagai berikut (Januari sampai dengan Juni 2025) :

1. Berdasarkan Jabatan Struktural/Fungsional

Tabel 3.3
Komposisi Pegawai berdasarkan Jabatan Struktural/Fungsional

NO	JABATAN	JUMLAH	TINGKATAN (eselon/ jenjang)	Ket
1.	Kepala Badan	1 orang	II-a	Ada
2.	Sekretaris	0 orang	III-a	Tidak Ada
3.	Kepala Bidang	1 orang	III-a	Ada
4.	Kepala Sub Bagian/Sub Bidang	9 orang	IV-a	Ada
5.	Fungsional Tertentu	17 orang		Ada
6	Pelaksana	43 orang		
Total		71 orang		

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Badan Keuangan Daerah Prov. NTT

2. Berdasarkan Jenis Kelamin dan Golongan

Tabel 3.4
Komposisi Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin dan Golongan

NO	UNIT KERJA	JENIS KELAMIN		GOLONGAN			
		L	P	I	II	III	IV
1.	Sekretariat	7	6	-	1	10	2

2.	Bidang Anggaran	6	4	-	-	8	2
3.	Bidang Perbendaharaan	3	10	-	-	13	-
4.	Bidang Akuntansi dan Pelaporan	4	10	-	-	11	3
5.	Bidang Pembinaan Keuangan Kabupaten/Kota	6	6	-	1	10	1
6.	CPNS	4	5	-	-	9	-
Jumlah		30	41		2	61	8
Total		71		71			

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Badan Keuangan Daerah Prov. NTT

3. Berdasarkan Agama

Tabel 3.5
Komposisi Pegawai Berdasarkan Agama

NO	UNIT KERJA	AGAMA				
		KP	KK	Islam	Hindu	Budha
1.	Sekretariat	7	5	1	-	-
2.	Bidang Anggaran	4	6	-	-	-
3.	Bidang Perbendaharaan	7	5	1	-	-
4.	Bidang Akuntansi dan Pelaporan	6	7	1	-	-
5.	Bidang Pembinaan Keuangan Kabupaten/Kota	9	1	1	1	-
6.	CPNS	4	1	4	-	-
<i>Jumlah</i>		37	25	8	1	-
Total		71				

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Badan Keuangan Daerah Prov. NTT

4. Berdasarkan Pendidikan

Tabel 3.6
Komposisi Pegawai Berdasarkan Pendidikan Umum

NO	UNIT KERJA	TINGKAT PENDIDIKAN						
		SD	SLTP	SLTA	D.I II/ III	D.IV	S1	S2
1.	Sekretariat	-	-	2	-	1	5	5
2.	Bidang Anggaran	-	-	-	1	-	7	2

3.	Bidang Perbendaharaan	-	-	-	3	-	8	2
4.	Bidang Akuntansi dan Pelaporan	-	-	-	1	-	6	7
5.	Bidang Pembinaan Keuangan Kabupaten/Kota	-	-	3	-	1	5	3
6.	CPNS	-	-	-	-	-	9	-
Jumlah		-	-	5	5	2	40	19
Total		71						

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Badan Keuangan Daerah Prov. NTT

5. Tenaga Kontrak

Tabel 3.7.
Komposisi Tenaga Kontrak

NO	TENAGA KONTRAK	JUMLAH
1.	LAKI-LAKI	37
2.	PEREMPUAN	30
Total		67 orang

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Badan Keuangan Daerah Prov. NTT

3.2 Hasil Pelaksanaan Program dan Kegiatan

A. Kinerja Badan Keuangan

1. Realisasi Pendapatan

Pada Tahun Anggaran 2025, target pendapatan Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT sebesar **Rp. 3.231.595.017.857,-**. Berikut adalah realisasi Pendapatan Daerah kondisi Per 30 Juni 2025

Tabel. 3.8
Realisasi Pendapatan pada Badan Keuangan
per 30 Juni 2025

KODE	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
4.	PENDAPATAN DAERAH	3.231.595.017.857	1.281.333.484.222	39,65
4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	119.519.178.857	52.440.928.759	43,88
4.1.03.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	62.519.178.857	38.737.314.988	61,96
4.1.03.01.	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN	62.519.178.857	38.737.314.988	61,96
4.1.03.01.01.0001.	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Deviden) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	62.250.000.000	38.737.314.988	61,96
4.1.03.02.02.0001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Deviden) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Swasta	269.178.857		
4.1.04.	Lain-lain PAD yang Sah	57.000.000.000	13.703.613.771	24,04
4.1.04.05.	Jasa Giro	5.000.000.000	3.990.145.189	79,80
4.1.04.05.01.	Jasa Giro pada Kas Daerah	5.000.000.000	3.990.145.189	79,80
4.1.04.05.01.0001.	Jasa Giro pada Kas Daerah	5.000.000.000	3.990.145.189	79,80
4.1.04.07.	Pendapatan Bunga	1.000.000.000	1.862.226.095	186,22
4.1.04.07.01.	Pendapatan Bunga atas	1.000.000.000	1.862.226.095	186,22

KODE	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
	Penempatan Uang Pemerintah Daerah			
4.1.04.07.01.0001.	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	1.000.000.000	1.862.226.095	186,22
4.1.04.08.	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	30.000.000.000	709.436.565	2,36
4.1.04.08.01.	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara	30.000.000.000	709.436.565	2,36
4.1.04.08.01.0001.	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara	30.000.000.000	709.436.565	2,36
4.1.04.11.	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	10.000.000.000	100.516.595	1,01
4.1.04.11.01.	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	10.000.000.000	100.516.595	1,01
4.1.04.11.01.0001.	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	10.000.000.000	100.516.595	1,01
4.1.04.15.	Pendapatan dari Pengembalian	11.000.000.000	7.041.289.325	64,01
4.1.04.15.01.	Pendapatan dari Pengembalian kelebihan pembayaran gaji pokok ASN	1.000.000.000	53.246.781	5,32
4.1.04.15.01.0001.	Pendapatan dari Pengembalian kelebihan pembayaran gaji pokok ASN	1.000.000.000	53.246.781	5,32
4.1.04.15.03.	Pendapatan dari Pengembalian kelebihan belanja tunjangan			

KODE	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
	pph/tunjangan khusus /tunjangan PPPK			
4.1.04.15.03.0001.	Pendapatan dari Pengembalian kelebihan belanja tunjangan pph/tunjangan khusus /tunjangan PPPK			
4.1.04.15.04.	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas	10.000.000.000	6.988.042.544	69,88
4.1.04.15.04.0001.	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Negeri- Perjalanan Dinas Biasa	10.000.000.000	6.988.042.544	69,88
4.2.	PENDAPATAN TRANSFER	3.112.075.839.000	1.228.892.555.463	39,49
4.2.01.	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	3.112.075.839.000	1.105.542.687.344	39,49
4.2.01.01.	Dana Perimbangan	3.112.075.839.000	1.105.542.687.344	39,49
4.2.1.01.06	Insentif Fiskal	6.700.771.000	3.350.385.500	50,00
4.2.1.01.06.02.01	Insentif Fiskal untuk Penghargaan Kinerja Tahun sebelumnya	6.700.771.000	3.350.385.500	50,00
4.2.01.07.01.	DBH Pajak Bumi dan Bangunan	61.652.427.000	22.531.091.400	36,55
4.2.01.01.01.0001.	DBH Pajak Bumi dan Bangunan	4.059.812.000	1.782.124.800	43,90
4.2.01.01.01.0003.	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN	48.258.335.000	19.303.334.000	40,00
4.2.01.01.01.0004.	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	7.760.954.000	827.834.800	10,67

KODE	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
4.2.01.01.01.0007.	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Pengusahaan Panas Bumi	1.046.825.000	418.730.000	40,00
4.2.01.01.01.0008.	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Landrent	397.747.000	159.098.800	40,00
4.2.01.07.02.0007.	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	90.312.000	36.124.800	40,00
4.2.01.07.02.0008.	Bagi Hasil Sumber Daya Alam Dana Reboisasi (DR)	38.442.000	3.844.200	10,00
4.2.01.01.02.	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	2.029.253.589.000	870.227.526.318	42,88
4.2.01.01.02.0001.	DAU tidak ditentukan penggunaannya	1.542.866.521.000	779.609.515.318	50,53
4.2.01.01.02.0004	DAU tambahan dukungan Pendanaan atas Penggajian PPPK	184.327.030.000	-	0,00
4.2.01.01.02.0005	DAU yg ditentukan penggunaanya bidang Pendidikan	260.918.641.000	78.275.592.000	30,00
4.2.01.01.02.0006	DAU yg ditentukan penggunaanya bidang Kesehatan	41.141.397.000	12.342.419.000	30,00
4.2.01.01.02.0007	DAU yg ditentukan penggunaanya bidang Pekerjaan Umum			-
4.2.01.01.03.	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	51.732.870.000	-	-
4.2.01.01.03.0004.	DAK Fisik-Bidang Pendidikan- Reguler-SMA	33.415.284.000	-	0,00
4.2.01.01.03.0005.	DAK Fisik-Bidang Pendidikan- Reguler-SLB	321.800.000	-	0,00
4.2.01.01.03.0060	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB -Reguler Penguatan Kesehatan	17.995.786.000	-	0,00

KODE	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
4.2.01.01.04.	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	962.736.182.000	332.560.393.009	34,54
4.2.01.01.04.0001.	DAK Non Fisik-BOS Reguler	495.437.539.000	247.709.706.500	50,00
4.2.01.01.04.0003.	DAK Non Fisik-BOS Kinerja	10.931.750.000	-	0,00
4.2.01.01.04.0004.	DAK Non Fisik-TPG PNSD	419.218.077.000	77.291.710.605	18,44
4.2.01.01.04.0005.	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	8.472.748.000	-	0,00
4.2.01.01.04.0006.	DAK Non Fisik-TKG PNSD	16.318.485.000	3.528.855.825	21,62
4.2.01.01.04.0009.	DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Museum	1.881.156.000	904.522.400	48,08
4.2.01.01.04.0010.	DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Taman Budaya	2.000.000.000	931.572.427	46,58
4.2.01.09.02.0022.	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	450.742.000	202.159.236	44,85
4.2.01.09.02.0032.	Bantuan Operasional Kesehatan	6.883.685.000	1.644.025.252	23,88
4.2.01.09.02.0039.	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	200.000.000	100.000.000	50,00
4.2.01.09.02.0041.	DAK Non Fisik-Dana Bantuan Pengembangan Program Perpustakaan Daerah	750.000.000	375.000.000	50,00
4.2.01.09.02.0042.	DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	42.000.000		0,00
4.2.01.09.02.0043.	DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	150.000.000	75.000.000	50,00
4.3.	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH			

KODE	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
4.3.01.	Pendapatan Hibah			
4.3.01.01.	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat			
4.3.01.01.01.	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat			
4.3.01.01.01.0001.	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat			
4.3.01.04.01.0001.	Pendapatan Hibah dari Badan / Lembaga / Organisasi Swasta Dalam Negeri			
4.3.01.03.01.0001.	Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat / Perorangan		600.648.500	

SumberBidangPerbendaharaan(BUD)

2. Realisasi Anggaran Belanja berdasarkan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Berdasarkan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2025 Nomor : DPA/A.1/5.02.0.00.0.00.03.0000/001/2025, Belanja Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp.787.073.147.705,-. Pagu dan Realisasi Anggaran tercantum pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.9
Realisasi Anggaran Belanja pada Badan Keuangan Daerah
per 30 Juni 2025

NO						Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu	Realisasi	%
						KEUANGAN	787.073.147.705	199.020.811.106	25,28%
0	0	0	2			Badan Keuangan Daerah	787.073.147.705	199.020.811.106	25,28%
0	1					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	20.990.960.988	2.103.057.145	10,02%
1	1	0	1			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	422.994.096	139.119.316	32,89%
1	1	0	1	0	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	65.246.000	36.023.516	55,21%
1	1	0	1	0	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	104.060.800	50.683.100	48,71%
1	1	0	1	0	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	85.903.727	35.063.500	40,82%
1	1	0	1	0	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	76.433.569	17.349.200	22,70%
1	1	0	1	0	8	Pelaksanaan pengumpulan data statistik sektoral daerah	41.350.000		0,00%
1	1	0	1	0	10	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	50.000.000		0,00%
1	1	0	2			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	13.840.365.766	472.677.792	3,42%
1	1	0	2	0	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	11.320.416.166	3.367.577.703	29,75%
1	1	0	2	0	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	2.023.606.600	262.214.500	12,96%
1	1	0	2	0	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan	163.500.000	86.206.225	52,73%

NO							Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu	Realisasi	%
							Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			
1	1	0	2	0	4		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	75.330.000	9.449.000	12,54%
1	1	0	2	0	5		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	64.173.000	47.217.367	73,58%
1	1	0	2	0	6		Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	71.519.000	500.700.700	700,09 %
1	1	0	2	0	7		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	75.509.000	16.890.000	22,37%
1	1	0	2	0	8		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	46.312.000		0,00%
1	1	0	3				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	20.000.000	4.264.000	21,32%
1	1	0	3	0	1		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	10.000.000		0,00%
1	1	0	3	0	5		Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	10.000.000	4.264.000	42,64%
1	1	0	5				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	232.158.000	74.638.203	32,15%
1	1	0	5	0	3		Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	141.079.000	61.735.823	43,76%
1	1	0	5	0	5		Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	91.079.000	12.902.380	14,17%
1	1	0	6				Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.455.980.242	645.270.015	44,32%
1	1	0	6	0	2		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	27.709.000	500.000	1,80%

NO						Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu	Realisasi	%
1	1	0	6	0	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	26.189.000	1.153.239	4,40%
1	1	0	6	0	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	355.243.520	147.337.376	41,48%
1	1	0	6	0	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	52.500.000	24.650.000	46,95%
1	1	0	6	0	7	Penyediaan Bahan/Material	200.000.000	120.003.250	60,00%
1	1	0	6	0	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	424.792.286	258.071.180	60,75%
1	1	0	6	0	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	337.640.000	93.554.970	27,71%
1	1	0	6	0	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	31.906.436		0,00%
1	1	0	7			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.040.679.000	214.619.315	20,62%
1	1	0	7	0	5	Pengadaan Mebel	38.824.000	4.056.200	10,45%
1	1	0	7	0	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	501.855.000	210.563.115	41,96%
1	1	0	7	0	9	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	500.000.000		0,00%
1	1	0	8			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.671.463.884	432.314.500	11,77%
1	1	0	8	0	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	34.565.400	10.074.500	29,15%
1	1	0	8	0	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	750.000.000	312.500.000	41,67%
1	1	0	8	0	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.886.898.484	109.740.000	3,80%
1	1	0	9			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	287.320.000	120.154.004	41,82%

NO						Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu	Realisasi	%
1	1	0	9	0	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	236.820.000	108.709.704	45,90%
1	1	0	9	0	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	50.500.000	11.444.300	22,66%
1	1	1	4			Fasilitasi Keprotokolan	20.000.000		0,00%
1	1	1	4	0	1	Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	20.000.000		0,00%
0	2					PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	766.082.186.717	192.444.979.378	25,12%
2	2	0	1			Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	9.117.716.177	1.123.188.327	12,32%
2	2	0	1	0	1	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	409.098.000		0,00%
2	2	0	1	0	2	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	407.052.000		0,00%
2	2	0	1	0	5	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA- SKPD	209.819.000	106.590.682	50,80%
2	2	0	1	0	6	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	430.227.800		0,00%
2	2	0	1	0	7	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2.675.048.112		0,00%
2	2	0	1	0	8	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	3.023.238.813	877.055.145	29,01%

NO						Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu	Realisasi	%
2	2	0	1	0	9	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	1.963.232.452	139.542.500	7,11%
2	2	0	2			Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	2.035.277.005	305.510.650	15,01%
2	2	0	2	0	2	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota	406.438.000		0,00%
2	2	0	2	0	3	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota	407.968.000		0,00%
2	2	0	2	0	4	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	484.694.000	14.678.100	3,03%
2	2	0	2	0	5	Asistensi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota	608.470.500	231.028.800	37,97%
2	2	0	2	0	7	Asistensi Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	41.398.000	32.728.750	79,06%
2	2	0	2	0	12	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah daerah Konsolidasian Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Statistik	86.308.505	27.075.000	31,37%

NO						Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu	Realisasi	%
						Kuangan Pemerintah Deareh			
2	2	0	3			Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	1.853.943.796	550.381.236	29,69%
2	2	0	3	0	1	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	360.444.296	215.556.339	59,80%
2	2	0	3	0	3	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	256.557.600	71.340.968	27,81%
2	2	0	3	0	5	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	382.648.400		0,00%
2	2	0	3	0	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	509.582.200	214.883.929	42,17%
2	2	0	3	0	8	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	344.711.300	48.600.000	14,10%
2	2	0	4			Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	2.775.407.652	678.378.682	24,44%
2	2	0	4	0	2	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-	323.085.212	165.006.790	51,07%

NO						Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu	Realisasi	%
						LO, dan Beban			
2	2	0	4	0	3	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	675.930.891	154.840.200	22,91%
2	2	0	4	0	4	konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	635.935.249	358.458.692	56,37%
2	2	0	4	0	5	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi	1.140.456.300		0,00%
2	2	0	5			Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	750.299.842.087	189.787.520.483	25,29%
2	2	0	5	0	4	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	47.206.923.484	27.475.888.429	58,20%
2	2	0	5	0	8	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	36.691.308.847		0,00%
2	2	0	5	0	9	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	13.149.302.896	725.197.800	5,52%
2	2	0	5	0	10	Pengelolaan Dana bagi Hasil Provinsi	653.252.306.860	161.586.434.254	24,74%

Sumber : SPJ Belanja – Fungsional Juni 2025



B. Kinerja Badan Keuangan Daerah berdasarkan Program dan Kegiatan

Hasil pelaksanaan program dan kegiatan yang merupakan Kinerja Badan Keuangan Daerah sebagai berikut:

Sampai dengan 30 Juni 2025, hasil pelaksanaan program dan kegiatan pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT terdiri dari 13 kegiatan dan 74 sub kegiatan dimana setiap kegiatan dan sub kegiatan terbagi dalam 2 (dua) program, dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Program ini secara teknis menjadi tanggungjawab sekretariat Badan keuangan Daerah adapun Pagu sebesar Rp.20.990.960.988,- terealisasi sebesar Rp.2.103.057.145,- dengan presentase (10,02%).

a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja PD

Sub Bagian PDE bertanggungjawab untuk menangani kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD, Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD, Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah. Pagu sebesar Rp. 422.994.096,- Realisasi sebesar Rp. 139.119.316,- (32,89%). Hasil (output) pelaksanaan kegiatan,

- ⇒ Tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun Anggaran 2025 telah disusun pada Badan Keuangan Daerah Bulan Juni 2025;
- ⇒ Tersusunnya Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ);
- ⇒ Tersusunnya LPPD (Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah)

- ⇒ Tersusunnya SK Pembentukan Pembantu Pejabat Pengelola Keuangan dan Dokumentasi pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT Tahun Anggaran 2025.
- ⇒ Tersusunnya SK Pejabat Pengelola Pengaduan Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Masyarakat Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT Tahun Anggaran 2025.
- ⇒ Laporan bulanan, Triwulan dan semesteran 2025

b. Sub Kegiatan Administrasi Keuangan

Sub Bagian Keuangan bertanggungjawab menangani kegiatan Administrasi Keuangan Daerah dengan sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN, Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD, Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD, Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD, Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan, Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD, dan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran. Pagu sebesar Rp. 13.840.365.766,- Realisasi Rp.472.677.792,- (3,42%). Hasil (output) pelaksanaan kegiatan:

- ⇒ Tersusunnya Laporan Realisasi Keuangan
- ⇒ Terjawabnya temuan Inspektur Jenderal.
- ⇒ SPP/SPM-GU kepada pengguna Anggaran.
- ⇒ SPP/SPM-GU kepada BUD.
- ⇒ SPJ fungsional kepada PPK SKPD untuk divirifikasi.
- ⇒ SPJ Administrasi kepada PPK SKPD untuk divirifikasi.
- ⇒ Pengisian buku cek dan pengembalian tunai uang kas di Bank .
- ⇒ Menerima dan menyimpan uang persediaan .
- ⇒ Membukukan penyeteroran atas pungutan Pajak.

- ⇒ Membuat rekapitulasi data realisasi belanja bunga, belanja DBH, bantuan keuangan dan BTT.

c. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah

Sub Bagian Kepegawaian dan Umum bertanggungjawab menangani kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah, yang terdiri dari beberapa sub kegiatan yaitu Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD, Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD, dan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD. Pagu sebesar Rp. 20.000.000,- Realisasi Rp 4.264.000,- (21,32%). Hasil (output) pelaksanaan kegiatan :

- ⇒ Tersusunnya Laporan Barang Milik Daerah.
- ⇒ Tersusunnya rencana kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD).

d. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Sub Bagian Kepegawaian dan Umum bertanggungjawab menangani kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terdiri dari Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian, Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai dan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi. Pagu sebesar Rp.232.158.000,-Realisasi Rp.74.638.203,- (32,15%). Hasil (output) pelaksanaan kegiatan :

- ⇒ Tersusunnya Laporan Budaya Kerja.
- ⇒ Penyelesaian Dokumen Kenaikan Pangkat.
- ⇒ Penyelesaian Dokumen Pensiun.
- ⇒ Tersusunnya Laporan Presentasi Kehadiran.
- ⇒ Penyusunan Laporan Implementasi SPBE Tahun 2023.
- ⇒ Pengusulan Kenaikan Pangkat .
- ⇒ Penginputan Anjab ABK Tahun 2025 Pada Aplikasi Sinjab 3.8.

e. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Sub Bagian Keuangan bertanggungjawab menangani kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terdiri dari Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, Penyediaan Bahan/Material, Fasilitas Kunjungan Tamu, Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, dan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD. Pagu sebesar Rp. 1.455.980.242- Realisasi

Rp. 645.270.015,- (44,32%). Hasil (output) pelaksanaan kegiatan :

- ⇒ Tersedianya Peralatan Rumah Tangga
- ⇒ Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan
- ⇒ Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- ⇒ Tersedianya Bahan/Material

f. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Sub Bagian Kepegawaian dan Umum bertanggungjawab menangani kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terdiri dari Sub Kegiatan Pengadaan Mebel dan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya. Pagu sebesar Rp. 1.040.679.000,-Realisasi Rp. 214.619.315 ,- (20,62%).

g. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Sub Bagian Kepegawaian dan Umum bertanggungjawab menangani kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terdiri dari Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat

Menyurat, Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, dan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Melebihi Pagu Validasi. Pagu sebesar sebesar Rp. 3.671.463.884,- Realisasi Rp. 432.314.500,- (11,77%). Hasil (output) pelaksanaan kegiatan
⇒ Tersedianya Jasa Surat Menyurat

h. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Sub Bagian Kepegawaian dan Umum bertanggungjawab menangani kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terdiri dari Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya, dan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya. Pagu sebesar Rp.287.320.000,- Realisasi Rp. 120.154.004,-(41,82%). Hasil (output) pelaksanaan kegiatan :
⇒ Tersedianya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

2. Program Pengelolaan Keuangan Daerah

Program Pengelolaan Keuangan Daerah ditangani oleh 4 Bidang yaitu Bidang Anggaran, Bidang Pembinaan Keuangan Kabupaten/Kota, Bidang Perbendaharaan dan Bidang Akuntansi dan Pelaporan. Dari pagu sebesar Rp. 766.082.186.717,- Realisasi Rp. 192.444.979.378,-(25,12%) Berikut adalah realisasi kinerja per kegiatan :

a. Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah

Kegiatan ini ditangani oleh Bidang Anggaran dengan Pagu sebesar Rp. 9.117.716.177,- Realisasi Rp. 1.123.188.327,- (13,32%) Hasil (output) pelaksanaan kegiatan :

- ⇒ Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD;
- ⇒ Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD;
- ⇒ Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran;
- ⇒ Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS;
- ⇒ Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD;
- ⇒ Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS;
- ⇒ Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA;
- ⇒ Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD.
- ⇒ Konsultasi terkait Penetapan Dana Bagi Hasil (DBH) di PAD untuk PLTP di Flores (Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral);
- ⇒ Konsultasi terkait Pembayaran Tunjangan PPPK (Biro Umum Setda);
- ⇒ Konsultasi terkait Mekanisme PAP (Badan Pendapatan dan Aset);
- ⇒ Konsultasi terkait Dana Bos (Kab. Nagekeo).
- ⇒ Konsultasi terkait Perubahan Anggaran SKPD (Satuan Polisi Pamong Praja);
- ⇒ Konsultasi terkait Pelatihan Tenaga Kesehatan (UPTD Pelatihan Tenaga Kesehatan);
- ⇒ Konsultasi terkait Gaji 13 (Dinas KetenagaKerjaan dan Transmigrasi);
- ⇒ Konsultasi terkait SPD pada SIPD (Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa);
- ⇒ Konsultasi terkait RKA dan Pergeseran Anggaran ke 2 (Dinas petenakan).

Tabel 3.10

Hasil Pelaksanaan Bidang Anggaran Badan Keuangan Daerah
per 30 Juni 2025

Program	Rincian Kegiatan	Target (dokumen/kegiatan /buku)	Realisasi (dokumen/kegiatan /buku)	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Program Pengelolaan Keuangan Daerah	1. Koordinasi penyusunan dan verifikasi Dokumen Perubahan DPA-SKPD TA. 2025	- Proses Penyimpanan Dokumen Perubahan Kedua DPA-SKPD TA. 2025	Dokumen Perubahan Kedua DPA-SKPD TA. 2025	Terealisasi
		- Proses Tanda Tangan dan Pencetakan Dokumen Perubahan Kedua DPA-SKPD TA. 2025	Dokumen Perubahan Kedua DPA-SKPD TA. 2025	Terealisasi
	2. Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD dan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Perubahan APBD	- Rapat terkait Pembahasan progres pelaksanaan tahap I serta rencana penyampaian laporan tahap I kegiatan sumber dana DAU SG TA. 2025	Pembahasan ini sudah dilaksanakan	Terealisasi
		- Rapat terkait Pembahasan Data Calon PPPK formasi tahun 2024 yang lulus seleksi	Pembahasan ini sudah dilaksanakan	Terealisasi
		- Rapat terkait Pembahasan rencana laporan realisasi DAU	Pembahasan ini sudah dilaksanakan	Terealisasi

		SG TA. 2025 tahap I dan laporan penggunaan sisa DAU SG TA. 2025 dan 2024 tahap I		
		- Rapat terkait Pembahasan Perihal sosialisasi penyaluran DAU dukungan penggajian PPPK daerah Tahun 2025	Pembahasan ini sudah dilaksanakan	Terealisasi
		- Melakukan Penyesuaian Pagu Pergeseran kedua pada SKPD	Kegiatan ini sudah dilaksanakan	Terealisasi
	3. Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD dan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD	- Rapat terkait Pembahasan penyusunan kebijakan TPP Tahun 2026	Pemetaan ini sudah dilaksanakan	Terealisasi
		- Melakukan Penyusunan dan Pemetaan Standar Biaya Umum Usulan SKPD untuk Tahun Anggaran 2026	Pemetaan ini sudah dilaksanakan	Terealisasi

b. Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan ini ditangani oleh Bidang Pembinaan Keuangan Kabupaten/Kota dengan Pagu sebesar Rp. 2.035.277.005,- Realisasi Rp. 305.510.650,- (15,01%). Hasil (output) pelaksanaan kegiatan dijelaskan dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.11
Hasil Pelaksanaan Bidang Pembinaan Keuangan Kabupaten/Kota Badan Keuangan
Daerah per 30 Juni 2025

NO	PROGRAM/ KEGIATAN /RINCIAN KERJA	BENTUK/ WUJUD	REALISASI	KETERANGAN
PROGRAM : PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH				
KEGIATAN : PEMBINAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)
A.	Sub kegiatan : Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota dengan rincian kegiatan sebagai berikut :			Kegiatan akan dilaksanakan pada bulan Oktober sampai dengan bulan Desember 2025
B.	Sub kegiatan : Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota			Kegiatan akan dilaksanakan pada bulan Juli sampai dengan Oktober 2025

C.	Sub kegiatan : Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dengan rincian kegiatan sebagai berikut :			Kegiatan akan dilaksanakan pada bulan Mei sampai dengan Agustus 2025
D.	Sub kegiatan : Asistensi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota dengan rincian kegiatannya yaitu Rapat Koordinasi Keuangan Daerah			Kegiatan akan dilaksanakan pada bulan Mei 2025
	1. Menyiapkan administrasi pelaksanaan Rakor Pengelolaan Keuangan Daerah antara lain: a. Kerangka acuan kegiatan. b. Surat Undangan Ke Kab/Kota. c. Surat Permintaan Narasumber (Dirjen	dokumen dan surat-surat administrasi dalam rangka pelaksanaan Rakor Pengelolaan Keuangan Daerah	Telah selesai diproses dan untuk surat-surat telah dikirimkan sesuai peruntukannya	

	Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri,BPJS Ketenagakerjaan, Kepala BAPPERINDA, Kepala Dinas Nakertrans). d. Jadwal kegiatan. e. Susunan acara welcome diner. f. Laporan Panitia Penyelenggara. g. Sambutan . h. Materi Kepala Badan Keuangan Daerah Prov NTT i. Materi Diskusi Kelompok (PenganggaranPelaksan aan dan Pertanggungjawaban dan Aset)			
--	---	--	--	--

	2. Sub kegiatan : Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasi Laporan Keuangan Kabupaten/Kota dan Statistik Keuangan Pemerintah Daerah dengan rincian kegiatan sebagai berikut :			
	3. Rekapitulasi Laporan Realisasi Anggaran (LRA) pada 22 Kabupaten/Kota	List rekapan LRA Kabupaten/Kota keadaan sampai dengan bulan Mei 2025 sebanyak 1 (satu) dokumen	1 (satu) list rekapan LRA Kabupaten/Kota dan telah dikirimkan kepada Kemendagri, Bank Indonesia dan Kanwil Perbendaharaan Provinsi NTT serta Kantor DJP Pajak Pratama	Berlanjut untuk LRA bulan Juni Tahun 2025 yang akan dilaporkan di bulan Juli Tahun 2025
	4. Menyusun Data Statistik Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2023	Draf daftar/list Data Statistik Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2023.	Draf data Statistik Keuangan Daerah tahun 2023	Berlanjut untuk bulan-bulan berikutnya
E.	Sub kegiatan : Asistensi Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota			Telah selesai dilaksanakan pada bulan Februari 2025
F.	Asistensi Pengelolaan			

	Keuangan DBH-CHT Kab/Kota			
	1. Koordinasi penandatanganan Berita Acara DBH-CHT dan Penyelesaian RKP DBH CHT TA 2025	Berita Acara DBH CHT dan RKP DBH CHT 2025 sebagai syarat salur	Telah di tandatangani Berita Acara dan penyampaian RKP DBH CHT TA 2025 22 kab/kota	
G.	Sub kegiatan : Pelaksanaan Kegiatan Umum dengan rincian kegiatan sebagai berikut :			
	1. Penyusunan laporan kegiatan bulan Mei 2025	Laporan kegiatan kegiatan bulan Mei 2025	Disampaikannya laporan kegiatan bidang pembinaan kab/kota bulan Mei 2025 kepada Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Berlanjut Laporan kegiatan bulan Juni yang dilaporkan di bulan Juli
	2. Pelaksanaan Rapat konsultasi dan koordinasi dari Pemerintah kabupaten TTS Terkait Pengelolaan Keuangan Daerah, Kantor Bea Cukai terkait Berita Acara DBH - CHT Bidang Penegakkan Hukum (Gakum)	Rapat konsultasi dan koordinasi dari Pemerintah kabupaten TTS Terkait Pengelolaan Keuangan Daerah, Kantor Bea Cukai terkait Berita Acara DBH- CHT Bidang Penegakkan Hukum (Gakum)	Terinformasinya berbagai hal terkait Pengelolaan Keuangan Daerah	Rapat dengan Bea Cukai dilaksanakan pada pada hari Kamis, 22 Mei 2025 dan Rabu, 28 Mei 2025 Rapat dengan Pemkab TTS pada hari Selasa, 27 Mei 2025 di Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT
H.	Tugas Tambahan :			

	Melaksanakan tugas sebagai Plt. Kepala Badan Keuangan Daerah dengan rincian :			
	1. Penyelesaian administrasi umum dan kepegawaian (Kenaikan Berkala, SKP Tahun 2023 maupun SKP Tahun 2024)	Dokumen SKP, Kenaikan Berkala dan SKP 2024	Tersedianya 3 jenis dokumen untuk ditindaklanjuti secara berkala.	Berlanjut untuk bulan April 2025
	2. Penyelesaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi NTT	Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Tersedianya 1 (satu) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	

Sumber : Laporan Bidang PKKK Juni 2025

c. Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah

Kegiatan ini ditangani oleh Bidang Perbendaharaan dengan Pagu sebesar Rp. 1.853.943.796,- Realisasi Rp. 550.381.236,- (29,69%). Hasil (output) pelaksanaan kegiatan dijelaskan dalam tabel berikut ini:

a. Selaku Bendahara Umum Daerah (BUD)

Saldo awal Rp. 549.269.330.984 realisasi Penerimaan sebesar Rp.530.268.918.784 sedangkan Realisasi Pengeluaran sebesar Rp.550.650.936.301,- dan sisa saldo RKUD per 30 Juni 2025 sebesar Rp.528.887.313.467,-

b. Saldo Deposito Rp.175.000.000.000,- dengan perincian sebagai berikut :

- ⇒ Bank BNI Rp. 60.000.000.000,-
- ⇒ Bank BRI Rp. 60.000.000.000,-

- ⇒ Bank Mandiri Rp. 35.000.000.000,-
- ⇒ Bank NTT Rp. 20.000.000.000,-
- c. Realisasi Keuangan khusus Bidang Perbendaharaan dengan anggaran sebesar Rp.1.853.943.796,- terealisasi Rp. 550.381.236,- atau 30 % yang terdiri dari:
 - ⇒ Sub Kegiatan 02.1.03.0001 Koordinasi dan pengelolaan Kas Daerah terealisasi Rp. 215.556.339,- atau 60 % dari anggaran sebesar Rp.360.444.296,-
 - ⇒ Sub Kegiatan 02.1.03.0003 Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD terealisasi Rp. 71.340.968,- atau 28 % dari anggaran sebesar Rp.256.557.600,-
 - ⇒ Sub Kegiatan .02.1.03.0005 Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer lainnya anggaran sebesar Rp.382.648.400,-
 - ⇒ Sub Kegiatan 02.1.03.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah terealisasi Rp. 214.883.929,- atau 42 % dari anggaran sebesar Rp.509.582.200,-
 - ⇒ Sub Kegiatan 02.1.03.0008 Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang timbul akibat pengelolaan kas, pelaksanaan analisis pembiayaan dan penempatan uang daerah sebagai optimalisasi kas anggaran sebesar Rp.48.600.000,- atau 14% anggaran sebesar Rp. 344.711.300,-

Tabel 3.12

Hasil Pelaksanaan Bidang Perbendaharaan Badan Keuangan Daerah
per 30 Juni 2025

PROGRAM	KEGIATAN	BENTUK/WUJUD	REALISASI	KET
Pengelolaan Keuangan Daerah	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Menerima, memverifikasi dan memproses SPP/SPM dari Perangkat Daerah (PD) Lingkup Pemprov. NTT dan selanjutnya diproses menjadi SP2D.	Belanja Daerah Terdiri Dari SP2D : 242 Doc LS Gaji PNSD 17 Doc & Guru (Gaji Induk) LS Terusan gaji 10 Doc LS Kekurangan 2 Doc Gaji LS Gaji 5 Doc Susulan LS Gaji PPPK 1 Doc LS Gaji 13 44 Doc LS Gaji 13 2 Doc PPPK LS Terusan 5 Gaji 13 LS Susulan 1 Doc Gaji 13 PPPK LS Modal 8 Doc GU 28 Doc TU 1 Doc LS TPP 27 Doc LS Susulan 2 Doc TPP LS TPP Purna 10 Doc Bhakti LS TPP PPPK 1 LS Honorer 41 Doc LS DPRD 2 Doc LS Barang dan 35 Doc Jasa	
		Membuat Laporan Bulanan tentang : - Data Belanja Gaji Pegawai dan TPP Bulan	SuratPengantar : 1. 900.1/1126/BKUD3.1	

		Mei Tahun Anggaran 2025 untuk Perhitungan Dana Alokasi Umum (DAU) - Data Belanja Gaji PPPK dan TPP Bulan Mei Tahun Anggaran 2025 untuk Perhitungan Dana Alokasi Umum (DAU) Ke Menteri Keuangan Republik Indonesia c.q Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK)	Tgl. 05 Juni 2025	
		Membuat SKPP (Pensiun BUP, Pensiun Dini, Janda Duda dan Pindah)	SKPP BUP Doc : 36 Doc SKPP : 2 Doc Meninggal SKPP pindah : 2 Doc	
		Menginput Perubahan data Gaji PNSD dan Guru SMA/SMK se Prov. NTT	Perubahan Gaji, Berkala/Naik Pangkat: PNS (SKPD) : 265 Orang PNS Guru : 123 Orang PPPK Tahap I : 4 Orang PPPK Tahap II : 6 Orang PPPK P1 : 5	

			Orang	
		Pembayaran Gaji Rutin Bulanan bagi PNS Lingkup Pemprov. NTT TA. 2025	- verifikasi berkas - enginputan data dalam Aplikasi SIM Gaji Taspen - encetakan Daftar Gaji - encetakan SP2D - ealisasi Pembayaran	
		Mengentri Buku Bantu Rekening Kas Daerah Provinsi NTT	Penerimaan : 3.844 Doc Pengeluaran : 242 Doc	
		Menginput Data Bukti Setoran dan SP2D dalam B IX	3.844 Doc	
		Melakukan Rekapitulasi dan penyeteroran PFK (Perhitungan Fihak Ketiga), yang terdiri dari beras, Taspen, Iuran Kesehatan, Iuran Ketenaga kerjaan, PPh Ps. 21, Taperum, PPN dan PPh Ps. 22	PNS pada 41 OPD Lingkup Pemprov. NTT, OPD Pengalihan 3 Kab/Kota dan Guru SMA/SMK Pengalihan 22 Kab/Kota	
		Melakukan verifikasi terhadap SP2D yang akan dilakukan pencairan	242 SP2D	
		Melakukan pengiriman Daftar	Surat Pengantar Nomor : 900.1.13.1/948/BKUD3.1	

		Transaksi Harian (DTH) dan Rekapitulasi Transaksi Harian (RTH) Bulan Mei 2025 ke KPP Pratama Kupang KPPN Kupang	Tanggal 14 Mei 2025 900.13/1147/BKUD3/2025 Tgl. 10 Juni 2025	
		Melakukan Pengiriman Daftar Rekapitulasi, bukti billing iuran wajib pegawai dan bukti billing iuran asuransi kesehatan bulan Mei 2025	Surat Pengantar Nomor : 1. 900.1/1108/BKUD3.3/2025 03 Juni 2025 (BPJS) 2. 900.1/1111/BKUD3.3/2025 Tgl . 03 Juni 2025 (TASPEN)	
	Pengagendaan Surat	Surat Masuk Surat Keluar	Total = 90 Surat Total = 15 Surat	
		Melakukan pengiriman bukti pembayaran beras ke Bulog Bulan Februari 2025	33 Setoran	
		Rekapitulasi LHP BPK RI dan Inspektorat Daerah Prov. NTT Keadaan Juni 2025	LHP BPK RI (23 kasus) Nominal Rp. 27.442.586,- LHP Inspektorat Daerah Prov. NTT (12 kasus) Nominal Rp. 1.650.449.831,- Kelebihan Tj. Keluarga PNS Model C (88 Kasus) Nominal Rp. 797.529.660,- Rincian terlampir	
		Penginputan perubahan gaji tanggal 1-10 setiap bulannya	Tepat waktu	

		pada SIM Gaji Web		
		Operator pada Aplikasi Gaji melakukan Print daftar gaji	Untuk dibayarkan pada gaji bulan Juli	
		Pelaporan DAU harus di upload melalui aplikasi SINERGI (sofcopy & hardcopy) yang sudah ditandatangani dan cap basah oleh pejabat yang berwenang, pengiriman paling lambat tanggal 14 setiap	Pelaporan DAU harus di upload melalui aplikasi SINERGI (sofcopy & hardcopy) yang sudah ditandatangani dan cap basah oleh pejabat yang berwenang, pengiriman paling lambat tanggal 14 setiap	
		bulannya. Apabila tidak dipenuhi maka penyampaian DAU bulan berikutnya di tunda		
		Penyusunan Laporan Progres Penyerapan Dana Pinjaman Ekonomi (PEN) Daerah antara PT. SMI dan Pemprov. NTT yang dikirim paling lambat setiap tanggal 10 setiap bulannya dan laporan tersebut harus terlebih dahulu sudah di reviu	Selalu tepat waktu	

		oleh Inspektorat daerah sebelum dikirim ke PT. SMI melalui aplikasi REVINA		
	Pembinaan Bendahara	Membuat surat keputusan Gubernur tentang: Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor: 900/109/BKUD3/2025 tentang Perubahan atas lampiran Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor: 900/31/BKUD3/2025 tentang Pejabat Pengelola Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Pada Perangkat Daerah.	Nomor: 900/109/BKUD3/2025 Tgl. 20 Juni 2025	
		Penyampaian Data BNBA Penyetoran IW PNSD dan IW Penda bagi ASN Provinsi NTT Ke BPJS Kesehatan Cabang Kupang	900.1/1189/BKUD3 Tgl. 13 Juni 2025	

d. Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah

Kegiatan ini ditangani oleh Bidang Akuntansi dan Pelaporan dengan Pagu sebesar Rp. 2.775.407.652,- Realisasi Rp 678.378.682,- (24,44%) Hasil (output) pelaksanaan kegiatan:

- a. Sub kegiatan rekonsiliasi dan verifikasi aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, belanja, pembiayaan, pendapatan-lo, dan beban jumlah anggaran sebesar Rp. 331.735.212,- sampai dengan tanggal 30 Juni 2025 terealisasi Rp.195.647.000 atau (58,97%).
- b. Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulan dan Semesteran dengan jumlah Anggaran sebesar Rp.675.930.891,- dan sampai dengan 30 Juni 2025 realisasi Sebesar Rp.154.840.200,- Atau (22,91%).
- c. Sub kegiatan konsolidasi laporan keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah daerah dengan jumlah anggaran sebesar Rp.635.935.249,- sampai dengan tanggal 30 Juni 2025 terealisasi sebesar Rp.358.458.692,- atau (56,37%).
- d. Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi NTT, dianggarkan sebesar Rp.1.006.506.300,- dan realisasi sampai dengan tanggal 30 Juni sebesar Rp.0,00,- atau 0%.

Tabel 3.13
Realisasi Fisik Pelaksanaan Program dan Kegiatan
Bidang Akuntansi dan Pelaporan
per 30 Juni 2025

Program	Rincina Kegiatan	Target (dokumen/ kegiatan)	Realisasi (dokumen/ kegiatan)	Ket
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Akuntansi & Pelaporan Keuangan Daerah	1. Sub kegiatan rekonsiliasi dan ferifikasi aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, belanja,pembiayaan.pen dapata-IO, dan Beban	3 Laporan		
	2. Sub kegiatan koordinasi penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulan dan semesteran .	3 Dokumen 1. Laporan Bulanan. 2. Laporan Triwulan. 3. Laporan semester.		
	3. Sub kegiatan konsolidasi laporan keuangan SKPD,BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	4 Dokumen 1. 35 Lk SKPD 2. 4 Lk BUMD 3. 1 LKPD		
	4. Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang	4 Dokumen 1. Ranperda		

Program	Rincina Kegiatan	Target (dokumen/ kegiatan)	Realisasi (dokumen/ kegiatan)	Ket
	pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi NTT	2. Ranpergub 3. Perda 4. Pergub		

e. Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah

Kegiatan ini ditangani oleh Bidang Anggaran dan Bidang Akuntansi Pelaporan, terdiri dari Sub Kegiatan Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah dan Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan dan Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak dengan Pagusebesar Rp. 750.299.842.087,- Realisasi Rp. 189.787.520.483,-(25,29%). Hasil (output) pelaksanaan kegiatan :

- ⇒ Terkelolanya Dana Darurat dan Mendesak.
- ⇒ Laporan Hasil Analisis perencanaan dan penyaluran bantuan keuangan.

BAB IV

PERMASALAHAN DAN SOLUSI

4.1 Permasalahan dan Solusi

Dalam proses pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing bidang pada Badan Keuangan Daerah terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi. Adapun permasalahan yang dihadapi adalah sebagai berikut:

1. Sekretariat

a. Permasalahan

1. Sebagian besar (bidang/sub bidang/sekretariat/sub bagian) belum menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan tepat waktu sehingga terjadi keterlambatan.
2. Ketersediaan ASN yang masih terbatas.
3. Kurangnya bimtek atau diklat karena kurangnya ketersediaan dana.
4. Arsip data masing-masing pegawai belum terkumpul seluruhnya. Hal ini dikarenakan pegawai yang bersangkutan belum menyerahkan arsipnya pada Sub Bagian Kepegawaian dan Umum.
5. Penanganan disiplin pegawai belum optimal. Beberapa kasus pegawai yang tidak disiplin sering kali terlambat dilaporkan, sehingga proses penyelesaian menjadi lebih rumit.
6. Absen sidik jari PNS sering berubah waktu (jam) .
7. Tata Naskah Dinas yang tidak sesuai sehingga memperlambat proses tandatangan berkas.
8. Absen sidik jari PNS sering tidak terbaca.
9. Absen sidik jari Honorer yang diisi tidak sesuai dengan Absen Manual.
10. Berkas SKP tidak terkumpul ke kepegawaian.

11. Data dukung kepegawaian yang kurang lengkap.

b. Solusi

1. Masing-masing bidang/sub bidang/sub bagian segera menyampaikan Laporan Bulanan paling lambat satu minggu setelah diminta.
2. Mengusulkan penambahan ASN untuk ditempatkan pada Sekretariat.
3. Ditambah dana untuk bimtek dan diklat untuk seluruh pegawai.
4. selalu menyampaikan informasi terkait pengumpulan kelengkapan arsip data pegawai melalui Nota Dinas maupun WA grup.
5. Memberikan sanksi yang tegas dan konsisten terhadap pegawai yang indisipliner.
6. Atasan langsung rutin melakukan pengawasan terhadap kehadiran pegawai pada unit kerjanya, dan segera melaporkan kepada Kasubag Kepegawaian dan Umum apabila terdapat pegawai di unitnya yang melakukan tindakan indisipliner.
7. Peningkatan komunikasi dengan Dinas Kominfo terkait absensi.
8. Pembuatan Naskah Dinas harus sesuai dengan aturan Tata Naskah Dinas yang terbaru.
9. Peningkatan komunikasi dengan Dinas Kominfo terkait absensi.
10. Peningkatan sistim manajemen kepegawaian dan penguatan disiplin oleh pegawai.
11. Peningkatan sistim manajemen kepegawaian dan penguatan disiplin oleh pegawai.
12. Peningkatan sistim manajemen kepegawaian dan penguatan disiplin oleh pegawai.

2. Bidang Anggaran

a. Permasalahan

1. Permasalahan yang dihadapi terkait Keterlambatan proses penandatanganan DPA SKPD sehingga Mengakibatkan terhambatnya

Proses Percetakan DPA dan Mengalami Keterlambatan untuk dilakukan Penyerahan DPA SKPD Tahun 2025 oleh Penjabat Gubernur kepada Pimpinan SKPD;

2. Dikeluarkannya Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.13.1/6764/SJ Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Keringanan dan/atau Pengurangan Terkait Penerapan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Opsen Pajak Kendaraan Bermotor dan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.
3. Empat Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi NTT untuk dapat segera menggunakan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD).
4. Pada akhir bulan Januari masih terdapat 20 OPD yang belum mengajukan UP (Uang Persediaan).
5. Masih ada OPD yang belum mengajukan SPP/SPM Tenaga Kontrak, untuk Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah SK yang terbit terdapat kekeliruan pada nominal gaji yang tidak sama, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan masih verifikasi di GTK.
6. Keterlambatan penyampaian Data Rasionalisasi Anggaran Belanja oleh SKPD dalam Rangka Penyesuaian terhadap :
 - a. Penurunan target PAD yang bersumber dari PKB dan BBNKB sesuai surat edaran Kementrian dalam Negeri Nomor 900.1.13.1/6764/SJ tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Keringanan dan/atau Pengurangan Terkait Penerapan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Opsen Pajak Kendaraan Bermotor dan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, yang selanjutnya perlu dilakukan Rasionalisasi Belanja;
 - b. Perubahan Pendapatan Daerah sesuai Keputusan Kementrian Keuangan Nomor 29 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota

Tahun Anggaran 2025 dalam Rangka Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, yang selanjutnya perlu dilakukan Penyesuaian terhadap belanja yang dimaksud;

- c. Penyesuaian Program/Kegiatan dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi NTT Tahun Anggaran 2025 sesuai surat edaran Kementrian dalam Negeri Nomor 900.1.1/640/SJ tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, Selanjutnya Pemerintah Daerah segera menyesuaikan arah Kebijakan Pembangunan Daerah dengan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih serta Program Asta Cita kedalam Perubahan RKPD Tahun 2025 dan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025;
 - d. Serta Penyesuaian terhadap Kondisi mendesak atau Perubahan Prioritas Pembangunan Baik di tingkat Nasional atau Daerah Lainnya.
- 7. Permasalahan yang dihadapi terkait Keterlambatanm Penyampaian RKA hasil Rasionalisasi/Efisiensi dari SKPD sehingga proses Penginputan Mengalami Keterlambatan dari Jadwal yang telah ditetapkan.
 - 8. Permasalahan yang Dihadapi terkait Batas Waktu Penyampaian Dokumen Laporan Rancangan Penggunaan Anggaran Sisa DAU Spesifik Grant Penggajian PPPK Tahun Anggaran 2024 Merupakan Syarat Penyaluran DAU Spesifik Grant PPPK Tahun Anggaran 2025 namun SKPD Pengelola DAU Spesifik Grant tersebut terlambat menyampaikan Laporan dimaksud.

9. Permasalahan yang Dihadapi yakni pada proses Penginputan Rincian RKA SKPD yang mengalami keterlambatan Penginputan dikarenakan Kendala Maintenance pada Server SIPD di pusat, sehingga dibutuhkan waktu tambahan untuk penginputan RKA-SKPD (Peraturan Gubernur Pergeseran APBD Perubahan II Tahun Anggaran 2025).
- b. Solusi
1. Menindaklanjuti Permasalahan diatas, Langkah-langkah yang dilakukan Tim Kerja Bidang Anggaran yaitu berkoordinasi SKPD dan Tim SIPD di pusdatin Kementrian Dalam Negeri sehingga Proses penginputan dapat dilaksana sesuai ketentuan dan Peraturan Gubernur Pergeseran APBD Perubahan II Tahun Anggaran 2025 yang ditetapkan oleh kepala daerah.
 2. Menindaklanjuti Permasalahan diatas, Langkah-langkah yang dilakukan Tim Kerja Bidang Anggaran selalu berkoordinasi dengan SKPD agar melakukan percepatan penandatanganan DPA SKPD untuk proses cetak dan diserahkan pada SKPD;
 3. Terhadap permasalahan sebagaimana Huruf a Point 2 di atas dilakukan Rapat Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) sehingga disiapkan konsep/skema penyesuaian/pergeseran terhadap APBD.
 4. Badan Keuangan Daerah mengirimkan dokumen untuk kelengkapan penerbitan KKPD untuk 4 perangkat daerah: Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif , Badan Keuangan Daerah, Badan Kepegawaian Daerah, Inspektorat Daerah ke Bank NTT KCP Kantor Gubernur nomor 900.1/386/BKUD3 tanggal 24 Februari 2025.
 5. Bulan Februari jumlah OPD yang sudah mencairkan UP sebanyak 19 OPD yang belum ada 1 (satu) yaitu Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

6. OPD yang belum mengajukan SPP/SPM LS untuk pembayaran gaji Tenaga Kontrak bulan Januari dan Februari Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah SK sudah diproses perbaikan, untuk bulan Februari : Jasa Tendik SLB, Tenaga Guru SKO, Guru Kontrak SLB, Guru Kontrak SMA, Guru Kontrak SMK (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan).
7. Langkah-langkah yang dilakukan Tim Kerja Bidang Anggaran selalu berkoordinasi dengan SKPD agar Segera Menyampaikan Data Rasionalisasi Anggaran Belanja sesuai Surat Sekretaris Daerah Nomor : BU.900.1/11/BKEUDA/2025 tentang Penegasan Pemberitahuan Sebagai Tindak Lanjut Surat Edaran Menteri Dalam Negeri untuk dilakukan Penginputan ke dalam SIPD RI.
8. Tim kerja bidang Anggaran selalu berkoordinasi dengan SKPD guna mendorong percepatan proses penginputan RKA SKPD agar Proses Perubahan/Pergeseran Peraturan Gubernur APBD Pertama dapat dilakukan sesuai Jadwal yang telah ditetapkan.
9. Tim kerja bidang Anggaran selalu berkoordinasi dengan SKPD pengelola DAU Spesifik Grant Penggajian PPPK guna mendorong percepatan penyusunan penggunaan anggaran Sisa DAU Spesifik Grant agar dapat segera disampaikan Laporrannya kepada Kementrian Keuangan sesuai batas waktu yang ditentukan.
10. Menindaklanjuti Permasalahan diatas, Langkah-langkah yang dilakukan Tim Kerja Bidang Anggaran yaitu berkoordinasi SKPD dan Tim SIPD di pusdatin Kementrian Dalam Negri sehingga Proses penginputan dapat dilaksana sesuai ketentuan dan Peraturan Gubernur Pergeseran APBD Perubahan II Tahun Anggaran 2025 yang ditetapkan oleh kepala daerah.

3. Bidang Perbendaharaan

a. Permasalahan

1. OPD tidak tepat waktu menyampaikan SPP/SPM LS-Barang dan Jasa yang mengakibatkan terjadi penumpukan dokumen di akhir tahun dan tidak efektif proses penerbitan SP2D.
2. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan terlambat penyaluran TPP April – November sehingga pembayaran TPP dilakukan bersamaan dengan TPP Desember.
3. Terdapat OPD yang belum maksimal memanfaatkan penggunaan CMS Bank NTT.
4. Empat Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi NTT untuk dapat segera menggunakan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD).
5. Pada akhir bulan Januari masih terdapat 20 OPD yang belum mengajukan UP (Uang Persediaan).
6. Masih ada OPD yang belum mengajukan SPP/SPM Tenaga Kontrak, untuk Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah SK yang terbit terdapat kekeliruan pada nominal gaji yang tidak sama, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan masih verifikasi di GTK.
7. TPP Januari sudah bisa dibayarkan, masih terdapat OPD yang belum melakukan pengajuan pada aplikasi SI TPP.
8. Pada akhir bulan Maret masih terdapat 1 (satu) OPD yang belum mengajukan UP (Uang Persediaan).
9. Jadwal penatausahaan di tutup sementara karena Bidang Anggaran melakukan pergeseran perubahan Pergub I.
10. BPKP Perwakilan Prov. NTT akan melakukan Evaluasi Transfer Fiskal Daerah pada Pemerintah Provinsi NTT Tahun 2021- 2025
11. Pelantikan Pimpinan OPD harus dilakukan penyesuaian PA pada Aplikasi SIPD.

12. Mulai tanggal 03 Juni 2025 jadwal Penatausahaan di tutup sementara karena Bidang Anggaran melakukan pergeseran perubahan Pergub II.
 13. Jadwal pembayaran gaji ke -13 untuk Aparatur Negara lingkup Pemerintah Provinsi NTT.
 14. CPNSD Prov. NTT SK Pengangkatan 1 Juni 2025 sebanyak 1.380 orang.
- b. Solusi
1. Bidang Perbendaharaan telah menyelesaikan SPP/SPM LS-Barang Jasa yang diajukan oleh OPD menjadi SP2D dan proses transfer selesai ditanggal 30 Desember 2024.
 2. Bidang Perbendaharaan telah melakukan pembayaran TPP guru-guru tuntas sampai TPP Desember 2024.
 3. Bidang Perbendaharaan melakukan pembinaan Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan serta Monitoring dan Evaluasi Aplikasi CMS pada Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Prov. Nusa Tenggara Timur.
 4. Bidang Perbendaharaan telah menyelesaikan SPP/SPM LS-Barang Jasa yang diajukan oleh OPD menjadi SP2D dan proses transfer selesai ditanggal 30 Desember 2024.
 5. Bidang Perbendaharaan telah melakukan pembayaran TPP guru-guru tuntas sampai TPP Desember 2024.
 6. Bidang Perbendaharaan melakukan pembinaan Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan serta Monitoring dan Evaluasi Aplikasi CMS pada Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Prov. Nusa Tenggara Timur.
 7. Badan Keuangan Daerah mengirimkan dokumen untuk kelengkapan penerbitan KKPD untuk 4 perangkat daerah: Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif , Badan Keuangan Daerah, Badan Kepegawaian

Daerah, Inspektorat Daerah ke Bank NTT KCP Kantor Gubernur nomor 900.1/386/BKUD3 tanggal 24 Februari 2025.

8. Bulan Februari jumlah OPD yang sudah mencairkan UP sebanyak 19 OPD yang belum ada 1 (satu) yaitu Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
9. OPD yang belum mengajukan SPP/SPM LS untuk pembayaran gaji Tenaga Kontrak bulan Januari dan Februari Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah SK sudah diproses perbaikan, untuk bulan Februari : Jasa Tendik SLB, Tenaga Guru SKO, Guru Kontrak SLB, Guru Kontrak SMA, Guru Kontrak SMK (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan).
10. Sampai Bulan Maret jumlah OPD yang sudah dibayarkan TPP Januari ada 15 (lima belas) yaitu : Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Badan Kepegawaian Daerah, Badan Pengelola Perbatasan, Dinas Ketegakerjaan dan Transmigrasi, Badan Penanggulangan Bencana, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Badan Keuangan Daerah, Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan, Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah, Dinas Perhubungan, Badan Pendapatan dan Aset Daerah, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
11. Sampai akhir Maret jumlah OPD yang sudah mencairkan UP sebanyak 33 OPD yang belum, ada 1 (satu) yaitu Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
12. Sampai selesai tahapan penganggaran maka tahapan penatausahaan dapat dibuka kembali.
13. Sampai Bulan April jumlah OPD yang sudah dibayarkan TPP Januari ada 15 (lima belas) yaitu : Dinas Perindustrian dan Perdagangan,

Badan Kepegawaian Daerah, Badan Pengelola Perbatasan, Dinas Ketegakerjaan dan Transmigrasi, Badan Penanggulangan Bencana, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Badan Keuangan Daerah, Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan, Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah, Dinas Perhubungan, Badan Pendapatan dan Aset Daerah, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

14. Sampai akhir April jumlah OPD yang sudah mencairkan UP sebanyak 33 OPD yang belum, ada 1 (satu) yaitu Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
15. Sampai selesai tahapan penganggaran maka tahapan penatausahaan dapat dibuka kembali.
16. Pengelola pada bidang perbendaharaan sudah berkoordinasi dengan dinas Pendidikan dan Kebudayaan agar segera mengajukan TPP Februari-Maret pada aplikasi SI TPP untuk diverifikasi.
17. Dilakukan rapat untuk persiapan pemeriksaan BPKP pada Kamis, 8 Mei 2025 pukul 10.00 WITA di ruang rapat Sekretaris Daerah Prov. NTT yang diikuti oleh seluruh pimpinan Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Prov. NTT dan BPKP Perwakilan Prov. NTT.
18. Bidang Perbendaharaan melakukan penyesuaian PA pada Aplikasi SIPD.
19. Tahapan Penganggaran selesai dan Penatausahaan sudah dibuka kembali tanggal 16 Juni 2025.
20. Gaji ke 13 lingkup Pemerintah Provinsi NTT dibayarkan tepat waktu.
21. Bidang Perbendaharaan melakukan penginputan data CPNS pada Sim Gaji Taspen untuk proses gaji Juli 2025.

4. Bidang Akuntansi dan Pelaporan

a. Permasalahan

1. Terkait pelaksanaan program dan kegiatan dibidang Akuntansi dan Pelaporan tidak ada. Berkaitan dengan pelaksanaan program dan kegiatan pada Bidang Akuntansi dan pelaporan, penyerapan anggaran per 31 Maret 2025 untuk bidang akuntansi dan pelaporan sudah sesuai kondisi riil, mengikuti schedule/waktu pelaksanaan program/kegiatan.
2. Terkait pelaksanaan program dan kegiatan dibidang Akuntansi dan Pelaporan tidak ada. Berkaitan dengan pelaksanaan program dan kegiatan pada Bidang Akuntansi dan pelaporan, penyerapan anggaran per 30 Juni 2025 untuk bidang akuntansi dan pelaporan sudah sesuai kondisi riil, mengikuti schedule/waktu pelaksanaan program/kegiatan

5. Bidang Pembinaan Keuangan Kabupaten/Kota

a. Permasalahan

1. Belum tepat waktu Kabupaten/Kota menyampaikan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) setiap bulan dalam Tahun Anggaran 2025.
2. Belum tepat waktunya Kab/Kota menyampaikan RKP DBH-CHT TA.
3. Belum tepat waktunya beberapa Kabupaten dan Kota dalam menyampaikan hard copy dan soft copy Perda dan Perbup APBD TA 2025. Kabupaten yang belum menyampaikan hard copy yakni: Kabupaten Lembata, Kabupaten Sumba Tengah, Kabupaten Sabu Raijua, Kabupaten Manggarai, Kabupaten Ngada, Kabupaten TTS Kabupaten Manggarai Timur dan Kota Kupang. Kabupaten yang belum menyampaikan soft copy yakni Kabupaten Endedan Kabupaten Rote Ndao.

4. Belum tepatnya kab/kota menyampaikan data terkait anggaran dan realisasi APBD TA 2019 s/d Tahun 2024 dalam rangka evaluasi RAPBD TA 2024.
5. Belum tepatnya kab/kota menyampaikan data terkait LKPD unaudited TA 2024.
6. Belum tepatnya 5 (lima) kab/kota menyampaikan data penandatanganan Berita Acara hasil pembahasan dengan Kementerian teknis dan RKP TA 2025.
7. Belum tepatnya kab Ende menyampaikan data terkait LKPD unaudited Tahun Anggaran 2024.
8. Belum tepat waktunya beberapa Kabupaten dan Kota dalam menyampaikan *hard copy* dan *soft copy* Perda dan Perbup APBD Tahun Anggaran 2025. Kabupaten yang belum menyampaikan *hard copy* yakni: Kabupaten Lembata, Kabupaten Sumba Tengah, Kabupaten Manggarai, Kabupaten Ngada, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Kabupaten Alor, Kabupaten Manggarai Timur, Kota Kupang dan Kabupaten Ende. Kabupaten yang belum menyampaikan *soft copy* yakni Kabupaten Rote Ndao sudah namun pada lampiran belum ada pengesahan pejabat yang berwenang;
9. Belum tepatnya kab/kota menyampaikan data terkait anggaran dan realisasi APBD Tahun Anggaran 2019 s/d Tahun 2024 dalam rangka evaluasi RAPBD Tahun Anggaran 2024.
10. Belum tepatnya kab Ende menyampaikan data terkait LKPD unaudited Tahun Anggaran 2024.
11. Hampir sebagian besar pemerintah kab/kota yang belum menerapkan transaksi dengan menggunakan kartu kredit pemerintah daerah (KKPD).

b. Solusi

1. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur terus melakukan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota agar menyampaikan LRA tepat waktu setiap bulan sesuai jadwal yang ditentukan melalui grup whatsapp maupun dihubungi secara langsung.
2. Pemerintah Provinsi NTT akan tetap melaksanakan fungsi koordinasi dan konsultatif yang intensif dengan Pemerintah Daerah kabupaten/kota agar dapat segera menyusun dan menyampaikan RKP DBH- CHT TA 2025 bagi kabupaten yang belum menyampaikan.
3. Pemerintah Provinsi NTT akan tetap melaksanakan fungsi koordinasi yang intensif dengan Pemerintah Daerah kabupaten/kota agar dapat segera menyampaikan hard copy dan soft copy Perda dan Perbup APBD TA 2025 bagi kabupaten yang belum menyampaikan.
4. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur terus melakukan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota agar menyampaikan LRA tepat waktu setiap bulan, data anggaran dan realisasi APBD Tahun Anggaran 2019 s/d 2024, LKPD unaudited Tahun Anggaran 2024, sesuai jadwal yang ditentukan melalui grup whatsapp maupun dihubungi secara langsung.
5. Pemerintah Provinsi NTT akan tetap melaksanakan fungsi koordinasi yang intensif dengan Pemerintah Daerah kabupaten/kota agar dapat segera menyampaikan *hard copy* dan *soft copy* Perda dan Perbup APBD TA 2025, data anggaran dan realisasi APBD Tahun Anggaran 2019 s/d 2024, serta LKPD unaudited Tahun Anggaran 2024, sesuai jadwal yang ditentukan melalui grup whatsapp maupun dihubungi secara langsung.bagi kabupaten yang belum menyampaikan.
6. Pemerintah Provinsi juga akan tetap melaksanakan fungsi pembinaan kepada kab/kota yang belum memulai proses transaksi dengan menggunakan kartu kredit pemerintah daerah.

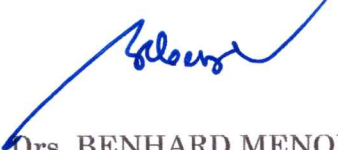
BAB V

PENUTUP

Demikian Laporan Semester I ini disusun dan disampaikan, sebagai bahan masukan dalam rangka pelaksanaan evaluasi kinerja pada lingkup Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2025. Hal – hal lain yang belum dimuat dalam panduan ini akan dibahas saat evaluasi berlangsung.

Kupang, Juli 2025

7 KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR, 12


Drs. BENHARD MENOH, MT
PEMBINA TINGKAT I (IV/B)
NIP. 19720512 199101 1 001